**MENCARI FORMAT IDEAL PEMBANGUNAN DESA**

Ika Sartika

**Abstrak**

Pembangunan desa yang sudah dilakukan selama puluhan tahun di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan format dan peraturan. Namun hasilnya sampai saat ini belum terlihat secara signifikan. Masyarakat desa tetap saja tertinggal dan miskin. Masih terjadi kesenjangan antara desa dan kota yang cukup lebar. Berbagai potret kegagalan dan keberhasilan pembangunan desa menunjukkan adanya beberapa kata kunci, yaitu sinergi antar daerah, antar sektor, dan antar pemerintah. Format ideal yang ditawarkan merupakan adopsi dari pendekatan klaster industri dengan berbagai *stakeholders*nya. Sebelum menerapkan pendekatan ini, perlu diidentifikasi terlebih dahulu potensi desa yang akan berfungsi sebagai industri inti, dan agen perubahan yang berasal dari masyarakat sebagai manajer klaster. Peran manajer klaster adalah mensinergikan kekuatan antar *stakeholders* dalam klaster industri yang terbentuk

**Abstract**

Rural development that has been done for decades in Indonesia has undergone various changes in format and rules. But the results so far have not seen significantly. Rural society was still underdeveloped and poor. There is a gap between rural and urban areas that is quite big. Various portraits of failure and success of rural development revealed a number of key words, namely a synergy among regions, among sectors, and between governments. The ideal format offered is the adoption of the industry cluster approach to the various its stakeholders. Before applying this approach, it is necessary to identify the potential of the village which will serve as the core industry, and agents of change from the community as a cluster manager. The cluster manager role is to synergize the strengths among stakeholders in the industry cluster formed

Keywords: rural development, potential of village, agents of change, cluster industry

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa, yang bersifat fisik, ekonomi, sosial budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa (Muhi, 2011). Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Pembangunan desa sebenarnya identik dengan pembangunan masyarakat desa, karena masyarakat desa merupakan subjek dan objek pembangunan desa. Artinya masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa, baik sebagai perencana dan pelaksana, maupun sebagai pengawas terhadap proses pembangunan desa. Di samping itu, masyarakat desa juga yang merasakan manfaat dan dampak dari pembangunan desa secara keseluruhan.

Sudah banyak program pembangunan desa yang dilaksanakan di Indonesia dengan segala peraturan pendukungnya, serta bantuan dari berbagai pihak, baik domestik maupun lembaga donor internasional. Namun, bukan rahasia pula, jika pembangunan yang dilaksanakan belum terasa manfaatnya oleh masyarakat desa. Desa dan masyarakatnya lebih banyak menjadi objek untuk memperoleh dana bantuan yang mengatasnamakan pembangunan desa dan dengan mengekspose kemiskinan desa secara terbuka.

Kegagalan pembangunan desa membawa dampak yang lebih parah, yaitu tingginya arus urbanisasi dengan harapan kehidupan di kota akan lebih baik dan menjanjikan. Hal ini dipicu oleh daya tarik kota yang membuat masyarakat desa lebih memilih berpindah tempat ke kota. Daya tarik kota sebagai pusat pemerintahan, pembangunan, serta ekonomi sangat menarik bagi masyarakat desa. Kesenjangan antara desa dengan kota ini juga merupakan bukti bahwa pembangunan pada hakikatnya belum berhasil.

Tanpa dibekali dengan kemampuan, keahlian, serta pendidikan yang memadai, tentu saja urbanisasi akan semakin memperparah keadaan. Ledakan penduduk yang tidak mempunyai identitas dan tempat tinggal yang jelas membuat maraknya pemukiman kumuh di kota. Tingginya kriminalitas juga dipicu oleh banyaknya penduduk, terutama pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Lebih jauh lagi, urbanisasi dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada akhirnya mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Arus urbanisasi dapat ditekan jika kesenjangan antara desa dan kota dapat diminimasi. Artinya, pembangunan di desa dan di kota berhasil membuat masyarakat di kedua tempat tersebut merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Pembangunan yang seimbang dan lebih berpihak pada masyarakat adalah yang diduga dapat membuat desa dan kota dapat berjalan seiring dan sejalan, tanpa membebani satu sama lain.

Pada dasarnya tidak ada satu teori atau pendekatan tunggal yang digunakan dalam rangka pembangunan perdesaan (desa). Berbagai konsep pembangunan desa yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun lima puluhan selalu mengalami dinamika dan perubahan serta senantiasa disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Tulisan ini mencoba mencari format ideal pembangunan desa yang diduga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkecil kesenjangan desa dan kota.

**PEMBANGUNAN DESA DARI WAKTU KE WAKTU: POTRET KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN**

Pembangunan desa yang dilakukan di Indonesia sebenarnya sudah mempertimbangkan karakteristik desa, perdesaan, serta masyarakat desa. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Bab IX Pembangunan Daerah, telah disebutkan dengan tegas bahwa sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsistem atau buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Di samping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukinan, adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat.

Tarigan (2003) mencatat beberapa konsep dan pendekatan pembangunan perdesaan (desa) yang pernah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara lain diantaranya adalah: (a) Pengembangan Masyarakat (*Community Development*), (b) Pembangunan Desa Terpadu (*Integrated Rural Development*), (c) Pembukaan Daerah Baru dan Mendorong Migrasi Penduduk serta Pengelompokan Permukiman Kecil, (d) Pembangunan Pertanian, (e) Industri Perdesaan, (f) Kebutuhan Dasar Manusia (*Basic Needs–Strategy*), (g) Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pengembangan (*Integrated Area Development*), serta (h) Pendekatan Agropolitan. Berbagai potret kegagalan dan keberhasilan akan diperlihatkan berikut ini. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep pembangunan desa yang telah diterapkan bisa berhasil di satu desa, tetapi gagal di desa lainnya. Artinya, ada hal-hal tertentu yang merupakan persyaratan utama yang harus diidentifikasi sebelum menerapkan konsep pembangunan di setiap desa.

Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) atau lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat sudah diterapkan sejak lama dengan harapan masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Karena pada dasarnya pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur (Purba, 2008). Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan di atas, akan mengacu pada proses aktif, dimana manyarakat penerima (*beneficiaries*) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Purba (2008), Purnamasari (2008), dan Rakhman (2008) memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan masih relatif lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah yang juga mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari keterbatasan kemampuan aparat pemerintah daerah yang menangani pembangunan perdesaan.

Di samping itu ada kecenderungan masyarakat desa tidak dilibatkan dalam pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Kebanyakan program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Masyarakat masih dianggap sebagai objek atau sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai objek atau sasaran pembangunan. Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas pada peran serta secara fiisk tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pengembangan masyarakat dianggap gagal ketika masyarakat belum mampu berperan secara optimal dalam pembangunan.

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan, yang menyebabkan gagalnya program pembangunan diantaranya adalah belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga antara kedua belah pihak masih terdapat perbedaan pandangan. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaan kegiatan masih ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita bisa melihat bagaimana desa dan masyarakatnya dijadikan objek pembangunan yang berorientasi pada habisnya anggaran di beberapa kementerian atau bahkan pemerintah daerah. Sebut saja beberapa jenis bantuan yang seringkali mampir ke desa tanpa disertai dengan koordinasi antar lembaga tersebut, seperti: PNPM Mandiri, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta Pemerintah Daerah setempat. Akhirnya bantuan tersebut yang semula ditujukan untuk memepercepat proses pembangunan desa, berakhir tanpa hasil. Ada kesan bantuan bersifat *hit and run* tanpa perencanaan dan koordinasi antar lembaga secara intensif. Ironisnya lagi, data jumlah masyarakat miskin yang akan dibantu pun kadang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Jelas, hal ini menyebabkan bantuan tidak akan berjalan dengan efektif, bahkan bisa salah sasaran. Ini juga bukti bahwa pembangunan desa belum berhasil alias gagal.

Kondisi di atas memperlihatkan dengan jelas belum sinergi dan terintegrasinya program-program pemberdayaan dari pemerintah (termasuk PNPM) dan non pemerintah dengan perencanaan pembangunan desa yang mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan yang ada di desa. Persentase desa-desa yang melakukan musyawarah pembangunan desa masih rendah sehingga usulan kegiatan masyarakat belum sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini diperburuk dengan minimnya dukungan regulasi bagi pengembangan desa dan perdesaan, sehingga perlu penyempurnaan dan penyiapan aturan hukum tentang desa. Peraturan yang ada masih bersifat global di level nasional, seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Secara lokal, pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan desa. Tetapi sebagian besar belum memadai dan belum menyentuh hal-hal yang bersifat teknis. Belum optimalnya pendataan potensi masyarakat melalui profil desa juga menyebabkan perencanaan pembangunan desa seringkali menggunakan data yang tidak akurat.

Implementasi program-program pembangunan desa semakin sulit direalisasikan karena belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan, termasuk transportasi perintis baik untuk angkutan penyeberangan, angkutan laut, maupun transportasi udara yang belum menjangkau semua desa di daerah tertinggal, daerah terpencil atau terluar, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Sarana dan prasarana transportasi menjadi penting di Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau-pulau kecil yang sangat banyak dan berada di lokasi terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Di lokasi seperti inilah sebagian masyarakat miskin tinggal. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi menyebabkan keberhasilan pembangunan desa hanya ada di atas kertas dan tidak akan tercapai dengan optimal.

Penyebab lain adalah kurang intensifnya pembinaan kepada masyarakat terutama dalam meningkatkan kewirausahaan, informasi peluang usaha atau pasar, permodalan maupun pengelolaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi. Hal inilah yang menyebabkan program industri pedesaan tidak berjalan dengan baik. Di samping itu, rendahnya aset yang dikuasai oleh masyarakat perdesaan juga menyebabkan modal yang dimiliki masyarakat tidak memadai untuk melakukan pengembangan usahanya. Akses kepada perbankan juga rendah karena masyrakat desa dianggap tidak mempunyai agunan untuk meningkatkan modal lewat pinjaman. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya inventarisasi dokumen pertanahan. Tidak pernah ada titik temu antara masyarakat desa dengan perbankan ketika berbicara tentang pinjaman modal. Perbankan meminta dokumen sah sebagai agunan seperti sertifikat tanah atau bangunan yang mempunyai IMB, sementara masyarakat desa tidak memiliki dokumen selengkap itu. Pada akhirnya program industri pedesaan lagi-lagi hanya sebatas program di atas kertas tanpa realisasi yang nyata.

Rasanya tidak adil, kalau potret yang dikemukakan hanya kegagalan yang terjadi dalam implementasi program-program pembangunan desa. Karena sejujurnya, ada beberapa desa yang berhasil dalam mengembangkan pembangunan desa dan masyarakatnya. Salah satu contoh adalah desa nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis. Program pembangunan yang melibatkan para nelayan dapat dikatakan berhasil karena paling tidak para nelayan punya kepastian untuk menjual hasil lautnya dengan harga yang pantas. Dengan demikian, perekonomian di desa tersebut bisa tumbuh. Para nelayan menjual hasil lautnya kepada seorang pengusaha lokal yang sudah mempunyai akses pasar baik domestik maupun global. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan karena terciptanya rantai pasok (*supply chain*) untuk produk hasil laut. Dari pengalaman di desa tersebut, terlihat bahwa keberhasilan tidak bisa lepas dari adanya figur kuat yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di desa nelayan tersebut, yaitu pengusaha lokal yang berperan sebagai distributor.

Keberhasilan lain bisa dilihat di Desa Ciseeng Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang terkenal dengan lokasi *outbound* yang biasa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, bahkan karyawan. Seperti kita ketahui bahwa *outbound* bukan hanya sebagai produk wisata tetapi sudah dianggap sebagai kebutuhan organisasi untuk melatih berbagai hal yang terkait dengan manajemen, seperti: kepemimpinan, motivasi, kerjasama, serta toleransi dalam bekerja. Masyarakat Desa Ciseeng sadar akan potensi pertanian dan wisata yang dimiliki dan mampu menyulapnya menjadi lokasi *outbound* yang memadai bagi masyarakat kota, sehingga terciptalah sebuah industri wisata yang berhasil mengurangi pengangguran di sekitar desa tersebut. Berkuragnya pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Masyarakat sekitar dididik menjadi pemandu wisata dan pelatih *outbound* yang handal, serta penyedia jasa lainnya, seperti makanan dan souvenir khas daerah tersebut. Inilah salah satu contoh tumbuhnya denyut ekonomi perdesaan yang tentu tidak lepas dari aspek promosi untuk mencari pelanggan. Tentu saja butuh figur yang menjadi lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Ciseeng, dalam hal ini adalah pengusaha lokal sebagai inisiator sekaligus pemodal dalam industri wisata ini.

**FORMAT PEMBANGUNAN DESA YANG IDEAL**

Berkaca pada potret kegagalan dan keberhasilan pembangunan desa yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa kata kunci yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menemukan format pembangunan desa yang ideal. Kata-kata kunci tersebut adalah sinergi pusat-daerah, sinergi antar-sektor, serta sinergi antar-daerah. Tarigan (2003) menawarkan sebuah konsep pembangunan desa yang mencoba mensinergikan kekuatan desa dan kota, yaitu: Keterkaitan Ekonomi Desa-Kota (Rural-Urban Economic Linkages). Konsep ini sudah banyak digunakan di beberapa negara di dunia, seperti di Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara di Afrika. Pada prinsipnya konsep ini menekankan bahwa desa dan kota mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa dan kota tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) antara desa dan kota dapat tercapai. Salah satu contoh keterkaitan desa-kota untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa tercapai melalui konsep Agropolitan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut. Fungsi kota lebih dititikberatkan sebagai pusat kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan, sementara itu kecamatan (*district*) justru yang memiliki fungsi sebagai unit pengembangan. Keterkaitan Desa-Kota selanjutnya digambarkan dalam Gambar 1 berikut ini.

**Kondisi Kota**

* Miskin SDA
* Kapasitas SDM cukup
* Padat penduduk
* Potensi pasar tinggi
* Informasi cukup
* Modal usaha tersedia

**Kondisi Desa**

* Kaya SDA
* Kapasitas SDM cukup tapi rendah kapasitas
* Lahan untuk produksi cukup
* Rendah informasi
* Modal usaha kurang

Linkage Desa-Kota

**Kontribusi Kota**

* Penyedia teknologi produksi dan riset
* Penyedia modal untuk produksi
* Tempat pemasaran hasil produksi desa
* Penyedia informasi

**Kontribusi Desa**

* Penyedia input produksi
* Tempat berproduksi
* Penyedia SDM untuk produksi

Lembaga

Intermediary

* Penghubung kepentingan desa-kota
* Lembaga kolaborasi stakeholder desa dan kota

Terjadi keseimbagan Desa-Kota

Gambar 1 Model Keterkaitan Ekonomi Desa-Kota (Tarigan, 2003)

Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah keterkaitan ekonomi desa-kota merupakan format pembangunan desa yang ideal? Jawabannya belum tentu, karena tergantung karakteristik desa yang ada. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, konsep ini lebih cocok untuk kasus agrobisnis atau agropolitan, artinya desa yang menjadi objek mempunyai potensi pertanian. Berangkat dari kondisi riil di lapangan, maka sangat dibutuhkan “*lembaga intermediary*” yang berfungsi sebagai lembaga penghubung kepentingan desa-kota. Disamping itu lembaga ini dapat menjadi lembaga kolaborasi semua *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan swasta) sehingga semua aspirasi dan kepentingan dapat terwadahi. Dengan kata lain, hubungan desa-kota menjadi dinamis yang ditandai dengan berfungsinya desa-kota sesuai perannya (kontribusinya) masing-masing. Di samping itu, keterkaitan ekonomi kedua wilayah tersebut dapat ditandai dengan desa memiliki daya tarik untuk investasi produksi dan tenaga kerja sedangkan kota memiliki daya tarik sebagai tempat pemasaran. Lembaga intermediary dapat memberikan layanan pengembangan bisnis meliputi (1) layanan informasi; (2) layanan konsultasi; (3) layanan pelatihan; (4) pendampingan; (5) kontak bisnis; (6) fasilitasi dalam memperluas akses ke pasar; (7) fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen; (8) fasilitasi memperoleh permodalan; (9) fasilitasi dalam pengembangan teknologi; serta (10) penyusunan proposal pengembangan bisnis.

Pada dasarnya, format ideal pembangunan desa tidak unik, mengingat karakteristik desa yang ada di Indonesia sangat beragam. Sebelum menentukan format pembangunan desa yang akan diterapkan, ada dua hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu, yaitu: potensi desa yang dapat dijadikan *core business* di desa tersebut serta agen perubahan (*agent of change*) yang berasal dari masyarakat yang akan berfungsi sebagai lokomotif dalam pembangunan desa.

Format pembangunan desa yang penulis tawarkan merupakan adaptasi dari pandangan Porter tentang adanya faktor-faktor pembentuk industri yang saling berinteraksi. Menurut Porter, daya saing dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang disebut sebagai faktor “*diamond*” yang dibentuk oleh (1) *factor conditions*, (2) *demand conditions*, (3) *related and supporting industries*, dan (4) *firm strategy, structure and rivalry*. Dia juga memasukkan dua factor konteks yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) *role of chance* dan (2) *role of government*.

Pengembangan klaster industri dapat digunakan untuk mengembangkan industri yang bersifat luas (*broad base*) dan terfokus pada jenis-jenis produk yang berpeluang memiliki daya saing internasional yang tinggi di pasar domestik dan global. Lingkup geografis klaster industri dapat sangat bervariasi, terentang dari satu desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Sebuah klaster industri dapat juga melampaui batas negara menjangkau beberapa negara tetangga.

Klaster industri pada dasarnya bukan konsep yang sama sekali baru. Namun sejalan dengan perkembangan jaman, telaah konsep atau teori dari pengalaman empiris berbagai pihak berkembang dari waktu ke waktu. Beragam definisi dan konsep tentang klaster industri dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Definisi klaster industri secara ringkas adalah: “Klaster industri merupakan kelompok usaha spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis.

Secara skema, pendekatan klaster industri dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Model Generik Klaster Industri (Porter, 1990, dalam Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, 2011)

Para pelaku (*stakeholders*) dalam suatu klaster biasanya dikelompokkan dalam industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait, dan pembeli, serta institusi pendukung (“non industri”). Istilah inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam klaster industri tertentu dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.

Potensi desa selanjutnya akan menjadi industri inti (*core industry*) yang akan bersinergi dengan *stakeholders* lainnya dalam klaster industri. Sedangkan masyarakat yang diidentifikasi sebagai agen perubahan dapat dijadikan manajer klaster yang berperan untuk mensinergikan kekuatan antar *stakeholders* dalam klaster industri yang ada. Rasanya tidak berlebihan jika format ini dicoba untuk diimplementasikan dalam pembangunan desa di Indonesia. Jika tingkat keberhasilannya tinggi maka konsep ini bisa dikatakan sebagai format ideal pembangunan desa.

**PENUTUP**

Pembangunan desa yang sudah dilakukan selama puluhan tahun di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan format dan peraturan. Namun hasilnya sampai saat ini belum terlihat secara signifikan. Masyarakat desa tetap saja tertinggal dan miskin. Masih terjadi kesenjangan antara desa dan kota yang cukup lebar. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) merupakan pemicu terjadinya kesenjangan ini. Akumulasi modal dan tenaga kerja difokuskan ke kota, sehingga pertumbuhan ekonomi di kota melesat dengan tajam, sementara desa semakin tertinggal karena keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Padahal desa melimpah dengan sumber daya alam.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota menyebabkan tingginya arus urbanisasi, dan hal ini dapat menimbulkan masalah baru bagi kota. Seperti sudah disebutkan pada bagian terdahulu, tingginya arus urbanisasi dapat membebani kota dengan masalah-masalah kerawanan sosial akibat ledakan penduduk yang tidak teratasi, seperti: banyaknya daerah kumuh, tingginya kriminalitas, serta maraknya pengemis dan gelandangan. Semua ini merupakan indikator bahwa pembangunan di desa dan di kota telah gagal.

Mencari format ideal pembangunan desa bukanlah hal mudah, perlu kajian mendalam serta uji coba di lapangan. Tetapi paling tidak berdasarkan beberapa potret kegagalan dan keberhasilan yang terjadi dalam proses pembangunan desa, dapat ditarik beberapa kata kunci yang merupakan pemicu keberhasilan dan penghalang kegagalan. Kata-kata kunci tersebut adalah sinergi antar daerah, antar sektor, serta antar pemerintah. Perbedaan karakteristik desa mengharuskan adanya proses identifikasi potensi desa terlebih dahulu untuk melihat *core business* yang dapat dikembangkan di desa tersebut. Selanjutnya dibutuhkan agen perubahan yang berasal dari masyarakat desa. Ini penting, karena akan berperan sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi di desa tersebut.

Format ideal yang ditawarkan adalah menjadikan potensi desa sebagai industri inti dalam klaster industri, sedangkan agen perubahan yang berasal dari masyarakat dapat berfungsi sebagai manajer klaster yang akan mensinergikan kekuatan antar *stakeholders* dalam klaster industri yang terbentuk. Format ini lebih berlaku umum dibanding keterkaitan ekonomi desa kota yang cenderung berorientasi pada agrobisnis, padahal tidak semua desa di Indonesia mempunyai potensi pertanian. Tentu saja, format ideal yang ditawarkan jika diimplementasikan diharapkan akan mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan pemerataan ekonomi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi, I.R., 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Chambers, R., 1992, Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang, Jakarta: LP3ES

Hikmat, H., 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora.

Hughes, D.W. and Litz, V.N., 1996, Rural-Urban Economic Linkages for Agriculture and Food Processing in the Monroe, Louisiana, Functional Economic Area, Journal of Agricultural and Applied Economics, 28, 2: 337-355.

Mardikanto, T., 2010, Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Surakarta: UNS Press.

Mardikanto, T., 2010, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, Surakarta: UNS Press.

Muhi, A.H., 2011, Desa: Tantangan dan Harapan, Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pambangunan Desa.

Purba, J.N., 2008, Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun (Studi tentang Program Bantuan Pembangunan Nagari/Kelurahan (BPN/K), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, 2011, Panduan Pengembangan Klaster Industri, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta.

Purnamasari, I., 2008, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, Semarang.

Rakhman, F., 2008, Karakteristik Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Skripsi, Universitas Negeri Malang.

Soetomo, 2011, Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tarigan, A., 2003, Rural - Urban Economics Linkages, Jurnal Forum Inovasi 6 Maret-Mei 2003: 69 – 82.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Usman, S., 2010, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, S. dan Tahir, I., 2007, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: Fokusmedia